

## TINGKAT KERENTANAN SOSIAL WILAYAH KABUPATEN WONOGIRI

Nisakhaira Rahmaningtyas<sup>1</sup> dan Jawoto Sih Setyono<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

<sup>2</sup>Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro  
email: nisakhaira11@gmail.com

**Abstrak:** Konsep kerentanan pada dasarnya muncul akibat adanya permasalahan kemiskinan. Kerentanan sosial wilayah menggambarkan kerapuhan sosial dari suatu wilayah akibat pengaruh dari adanya bahaya, ancaman dan bencana yang memiliki potensi merusak, mengganggu serta merugikan. Data tahun 2010 menunjukkan bahwa 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah terbagi menjadi 6 klaster tingkat kemiskinan. Klaster yang termiskin yaitu klaster 4 dengan rata-rata persentase keluarga miskin sebesar 51,87% yang kemudian diikuti oleh klaster 3 dengan rata-rata persentase keluarga miskin sebesar 32,36%. Kabupaten Wonogiri termasuk dalam klaster 3 bersama dengan sembilan kabupaten lainnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kerentanan sosial wilayah Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Objek penelitian ini adalah wilayah Kabupaten Wonogiri dengan unit analisis 25 kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Variabel yang diteliti yaitu modal manusia, modal sosial, kondisi geografis, jaringan politik dan pemerintahan, aset alam dan properti serta infrastruktur. Teknik analisis yang dilakukan meliputi analisis faktor dan analisis penskoran. Hasil analisis faktor memberikan gambaran adanya empat faktor dominan yang mempengaruhi tingkat kerentanan sosial wilayah di Kabupaten Wonogiri. Faktor dominan yang memiliki kontribusi terbesar dalam penentuan tingkat kerentanan yaitu faktor infrastruktur sebesar 30%. Sebagian besar wilayah Kabupaten Wonogiri termasuk dalam Kelas III dan IV yang berarti tingkat kerentanan sosial wilayah rendah dan tinggi.

**Kata Kunci:** kerentanan sosial, faktor kerentanan, tingkat kerentanan

**Abstract:** The concept of vulnerability is basically linked with the issues of poverty. Regional social vulnerability describes the condition social fragility of a region due to the influence of hazards, threats and disasters which have the potential to undermine, disrupt and harm the system. Data from 2010 statistical record show that 35 regencies and cities in Central Java are classified into six clusters of poverty. The poorest cluster is cluster 4 with an average percentage of poor households amounted to 51.87%, followed by cluster 3 with an average percentage of poor households amounted to 32.36%. Wonogiri Regency is included in cluster 3 along with nine other regencies. The purpose of this research is to determine the level of regional social vulnerability in Wonogiri Regency. This research uses quantitative approach with survey method. The object of this research is the regency of Wonogiri with 25 sub-districts as unit of analysis. The variables of research include human capital, social capital, geographical condition, political and governmental networks, natural assets, property and infrastructure. This research applies scoring and factor analyses. The results of factor analysis show there are four out of seven factors which affect the level of regional social vulnerability in the region. Infrastructure contributes the level of vulnerability with the total score 30%. Most regions of Wonogiri Regency fall into class IV and V. This means the degree of social vulnerability of the region is very high.

**Keywords:** social vulnerability, vulnerability factors, level of vulnerability

## PENDAHULUAN

Kerentanan sosial wilayah menggambarkan kerapuhan sosial dari suatu wilayah akibat pengaruh dari adanya bahaya, ancaman dan bencana yang memiliki potensi merusak, mengganggu serta merugikan. Kerentanan sosial wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial seperti karakteristik demografi wilayah, karakteristik sosial ekonomi wilayah, jaringan sosial atau masyarakat serta jaringan politik atau sistem kelembagaan wilayah. Suatu wilayah yang memiliki kondisi sosial yang rentan, maka akan menimbulkan dampak kerugian yang besar ketika menghadapi ancaman atau bencana.

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan banyak dihadapi oleh negara-negara di dunia, salah satunya negara Indonesia. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi terpadat di Indonesia dengan jumlah penduduk pada tahun 2006 mencapai 33,18 juta jiwa. Sedangkan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 8.844.220 KK, dimana 2.171.201 KK diantaranya termasuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin (RTM) (Bappeda Jateng, 2009 dalam Wahyudi & Rejekingsih, 2013).

Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu wilayah dari 10 kabupaten yang termasuk dalam klaster 3, sehingga dapat dikatakan bahwa kabupaten Wonogiri juga termasuk salah satu daerah tertinggal di provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data dan informasi kemiskinan Jawa Tengah tahun 2010, rata-rata jumlah persentase tingkat kemiskinan di kabupaten Wonogiri dari tahun 2005 hingga 2010 yaitu sebesar 26,28%. Angka tersebut melebihi angka rata-rata tingkat kemiskinan provinsi Jawa Tengah yaitu 20,02% yang artinya tingkat kemiskinan di kabupaten Wonogiri termasuk dalam kategori level yang tinggi.

Kabupaten Wonogiri terbagi menjadi 25 wilayah kecamatan dengan karakteristik dan kondisi yang berbeda-beda. Jika dilihat secara intrawilayah, wilayah perkotaan yang biasanya cenderung maju belum tentu tidak berpotensi rentan. Kecamatan Selogiri dan Kecamatan Wonogiri adalah wilayah perkotaan dengan pembangunan infrastruktur yang lebih maju daripada kecamatan lainnya, tetapi kedua

kecamatan tersebut merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi, yaitu sebesar 22.071 dan 20.425 jiwa. Selain itu, tingkat pengangguran tertinggi juga berada di Kecamatan Wonogiri sebesar 1.683 jiwa. Walaupun termasuk dalam wilayah perkotaan, Kecamatan Wonogiri bukan merupakan kecamatan dengan permukiman terpadat di wilayah Kabupaten Wonogiri. Wilayah yang memiliki kepadatan permukiman sangat tinggi adalah Kecamatan Tirtomoyo. Masing-masing kecamatan di Kabupaten Wonogiri memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Wilayah perkotaan dengan posisi wilayah yang cukup strategis serta dilengkapi oleh infrastruktur yang memadai belum tentu wilayah tersebut tidak mengalami kerentanan. Sebaliknya, wilayah yang tergolong terpencil serta belum memadainya fasilitas yang ada belum tentu juga selalu mengalami kerentanan yang sangat tinggi.

Kerentanan sosial sangat berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang timbul akibat tingginya tingkat kemiskinan. Permasalahan yang dimaksud, yaitu seperti tingginya pengangguran, rendahnya modal sosial dan manusia serta rendahnya upah minimum atau pendapatan keluarga. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, dapat dikatakan bahwa dari kondisi karakteristik demografi dan karakteristik sosial ekonomi kabupaten Wonogiri. Hal tersebut mengindikasikan bahwa wilayah kabupaten Wonogiri berpotensi mengalami kerentanan sosial wilayah dengan bermacam-macam tingkatannya pada setiap kecamatan-kecamatanannya. Dengan demikian, *research question* yang muncul adalah *"Apa saja faktor yang berpengaruh terhadap penentuan tingkat kerentanan sosial wilayah di Kabupaten Wonogiri dan seberapa besar kontribusi dari setiap faktor dominan tersebut?"* Artikel ini disusun berdasarkan laporan penelitian tingkat kerentanan sosial wilayah Kabupaten Wonogiri dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kerentanan sosial wilayah di Kabupaten Wonogiri.

Artikel ini terdiri dari lima bagian, yaitu pendahuluan, kajian literatur, metode penelitian, hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan rekomendasi. Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan

masalah dan tujuan dari topik yang diangkat dalam artikel ini. Kajian literatur berisikan gambaran singkat tentang hasil dari telaah pustaka beserta landasan teori yang digunakan. Metode penelitian membahas mulai dari strategi penelitian, objek yang diteliti, teknik pengumpulan data hingga proses analisis data yang telah diperoleh. Hasil dan pembahasan menjelaskan hasil yang diperoleh dari proses analisis yang sudah dilakukan. Bagian terakhir berisi kesimpulan yang dapat diambil serta rekomendasi yang sesuai dengan hasil penelitian.

### TELAAH PUSTAKA

Kerentanan sosial adalah sebagian dari hasil atau dampak kesenjangan sosial yang dipengaruhi faktor-faktor sosial atau bentuk kerentanan yang membahayakan/mengancam berbagai kelompok dan yang juga mengatur kemampuan mereka untuk merespon (Cutter et al., 2003). Kerentanan sosial menunjukkan potensi kehilangan pada elemen risiko khusus yang merujuk pada keadaan manusia, disertai kondisi yang menyertainya seperti usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi atau faktor lain yang dapat menyebabkan mereka berada dalam kondisi rentan (Birkman & Wisner, 2006 dalam Hizbaron et al., 2010). Kerentanan sosial mengacu pada karakteristik seseorang atau kelompok serta kondisi mereka terhadap yang mempengaruhi kapasitas mereka untuk mengantisipasi, mengatasi, menolak atau pulih dari dampak adanya suatu bahaya (Wisner et al., 2004 dalam Dunning & Durden, 2013). Kerentanan sosial merepresentasikan sebuah keadaan yang tidak dapat dipisahkan yang berada pra atau sebelum terjadinya bencana. Kerentanan sosial meliputi faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan kelembagaan (Cutter et al, 2003 dan Tunstall et al., 2007 dalam Lee, 2014).

Faktor kerentanan sosial meliputi modal manusia, pengembangan masyarakat, infrastruktur publik dan sumberdaya milik masyarakat (Lee, 2014). Sedangkan menurut Boshier (2007), ada empat faktor utama sosial-ekonomi penentu kerentanan yang mana mempengaruhi tingkat kerentanan yaitu akses terhadap kepemilikan aset-aset, akses

terhadap fasilitas publik, akses terhadap jaringan politik dan akses terhadap jaringan sosial.

Tingkat kerentanan sosial menggambarkan kondisi tingkat kerapuhan sosial dalam menghadapi bahaya (*hazards*). Pada kondisi sosial yang rentan maka jika terjadi bencana dapat dipastikan akan menimbulkan dampak kerugian yang besar. Tingkat kerentanan tinggi jika tingkat risiko yang muncul/dihasilkan bernilai besar akibat adanya bahaya. Oleh karena itu, suatu sistem perlu memiliki kapasitas ketahanan/penanggulangan yang tinggi dalam merespon bahaya agar tingkat risiko yang muncul bernilai kecil.

**Tabel I**  
**Kerentanan : Keterpaparan Bahaya dan Kapasitas untuk Mengatasi (Penanggulangan)**

		Kapasitas untuk Mengatasi	
		Tinggi	Rendah
Keterpaparan Bahaya	Tinggi	Kerentanan Rendah	Kerentanan Tinggi
	Rendah	Kerentanan Sangat Rendah	Kerentanan Rendah

Sumber : Adaptasi dari Sharma, et. al. 2000 dalam Alwang, J. et al., 2001

Faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan sosial wilayah pada umumnya yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan. Ketiga faktor tersebut dikemas oleh kebijakan atau faktor politik sebagai pengaturnya atau dapat dikatakan manajemen ketiga faktor tersebut.

Faktor sumber daya manusia (SDM) dianggap mempengaruhi tingkat kerentanan sosial wilayah di Kabupaten Wonogiri karena terdiri dari dua variabel yaitu modal manusia dan modal sosial. Modal manusia sendiri diukur berdasarkan karakteristik sosial-ekonomi wilayah dan karakteristik demografi suatu wilayah. Modal manusia dianggap seperti ketersediaan atau karakteristik sumberdaya manusia yang berkualitas. Suatu wilayah yang tergolong berkembang, cenderung memiliki kerentanan sosial yang tinggi akibat minim ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas. Sedangkan modal sosial atau bisa dikatakan jaringan sosial dianggap mempengaruhi tingkat kerentanan sosial karena kuatnya jaringan sosial dalam

suatu kehidupan bermasyarakat, dapat meningkatkan kualitas modal manusia. Modal sosial menggambarkan keberadaan lembaga dan organisasi sosial yang merepresentasikan bagaimana hubungan sosial di suatu wilayah. Lembaga dan organisasi dianggap dapat menjadi strategi dalam pengembangan individu-individu yang kemudian dapat membuat minimal sebuah keluarga memiliki kapasitas bertahan tinggi, sehingga mencegah timbulnya kerentanan yang tinggi.

Faktor sumber daya alam mempengaruhi tingkat kerentanan sosial karena semakin mudahnya menjangkau sumber daya alam atau mengakses aset-aset alam, maka kerentanan yang ditimbulkan cenderung rendah. Kondisi geografis suatu wilayah juga sangat mempengaruhi akses dalam memperoleh sumber daya alam. Wilayah yang memiliki kesulitan dalam mengakses aset-aset alamnya, maka akan tetap sulit dalam finansialnya sebelum maupun sesudah terjadi bencana. Oleh karena itu, faktor sumber daya alam diukur oleh variabel kondisi geografis dan aset-aset alam.

Faktor sumber daya buatan terdiri dari variabel infrastruktur publik dan kepemilikan aset properti suatu wilayah. Kedua faktor tersebut mempengaruhi tingkat kerentanan sosial karena semakin banyaknya fasilitas atau sarana dan prasarana wilayah serta aset rumah, maka memiliki kerentanan sosial yang semakin rendah. Sebab, kelengkapan fasilitas umum memudahkan penduduk dalam mengakses informasi dan teknologi serta kepemilikan properti yang bagus menandai tingkat kesejahteraan penduduk atau rumah tangga tergolong baik juga.

Faktor terakhir yaitu jaringan politik yang artinya, dimana suatu wilayah tingkat kerentanannya diukur melalui aspek kekuasaan. Semakin banyak wilayah yang memiliki keterwakilan politik di Negara atau pemerintahan serta juga memiliki banyak penduduk yang mempunyai hubungan dengan partai politik, akan cenderung memiliki kerentanan yang rendah. Hal tersebut berlaku karena jika kuatnya jaringan politik suatu wilayah, maka wilayah tersebut akan cenderung menerima bantuan yang cukup banyak dari dalam maupun luar (kemudahan

akses mendapat bantuan). Dengan demikian kapasitas bertahanannya tinggi dan risiko yang dihasilkan rendah, sehingga tingkat kerentanan wilayah tersebut rendah.

## METODE PENELITIAN

Strategi atau pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian tingkat kerentanan sosial wilayah di Kabupaten Wonogiri ini menggunakan pendekatan atau strategi penelitian dengan metode survei. Objek penelitian yang penelitian ini adalah wilayah Kabupaten Wonogiri yang terbagi menjadi 25 wilayah kecamatan.

Wilayah Kabupaten Wonogiri diteliti dengan berdasarkan perencanaan wilayah yang berfokus pada salah satu unsur pembentuk ruang wilayah yaitu aspek sosial. Oleh karena itu, kajian kerentanan wilayah yang diteliti berfokus pada segi sosial yang disebut kerentanan sosial wilayah. Kerentanan sosial wilayah tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi penentuan tingkat kerentanan sosial wilayahnya beserta kontribusi dari faktor-faktor dominan tersebut. Untuk mengetahui hal tersebut, maka diperlukan variabel-variabel penelitian yang dijabarkan menggunakan indikator variabel dan data. Jika dikaitkan dengan sumber datanya, jenis objek penelitian ini merupakan penelitian sekunder sebab data yang dibutuhkan tidak didapatkan secara langsung langsung melalui sumber pertamanya/utamanya yang artinya peneliti tidak berpartisipasi dalam perolehan data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kerentanan sosial wilayah di Kabupaten Wonogiri akan dilakukan dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumen dan orang lain. Wawancara atau interview dan telaah dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Telaah dokumen dilakukan untuk mencari data-data yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga pemerintah. Data-data yang didapatkan berupa data yang bersifat numerik yang akan digunakan dalam analisis pada penelitian ini. Ada juga beberapa data yang bersifat teks yang nantinya akan dikuantitatifkan dalam proses analisis.

Penelitian kerentanan sosial wilayah di Kabupaten Wonogiri merupakan penelitian

kuantitatif, sehingga dalam penelitian ini bagian analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data statistik deskriptif. Proses analisis data penelitian ini dimulai dari seluruh data pada masing-masing faktor dilakukan pengskoran atau pembobotan karena tidak semua data berjenis rasio, kemudian dilakukan analisis faktor menggunakan SPSS untuk mengetahui faktor-faktor dominan yang berpengaruh terhadap penentuan tingkat kerentanan sosial. Nilai skor ditentukan berdasarkan skala likert yang sudah ditetapkan. Setelah faktor-faktor dominan sudah diketahui, kemudian dilakukan kembali analisis skoring untuk menentukan tingkat kerentanan sosial wilayah Kabupaten Wonogiri pada 25 kecamatannya sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan sosial. Hasil dari penjumlahan skoring digunakan sebagai penentuan/ penggolongan kelas atau tingkatan kerentanan sosial wilayah di masing-masing kecamatan.

Penelitian kerentanan sosial wilayah di Kabupaten Wonogiri menggunakan metode atau teknik analisis data statistik deskriptif kuantitatif, yaitu analisis faktor dan analisis skoring. Dalam proses analisis faktor-faktor dominan digunakan analisis faktor dalam SPSS, data-data dalam setiap variabel yang dimasukkan sebelumnya diberi skor sesuai skala likert yang sudah ditentukan, sehingga memiliki bobot yang sama. Kemudian dilakukan proses reduksi faktor yang nantinya muncul tabel-tabel outputnya. Output analisis faktor yang diperhatikan yaitu tabel KMO dan *Anti Image*. Jika KMO bernilai lebih besar dari 0,5 maka data-data tersebut dapat digunakan dengan analisis faktor. Jika *Anti Image* (MSA) pada setiap variabel lebih dari 0,5 maka semua variabel merupakan faktor dominan. Akan tetapi, jika salah satu variabel bernilai kurang dari 0,5 maka perlu dilakukan proses analisis faktor kembali dengan menghilangkan variabel yang nilainya kurang dari 0,5 tersebut. Setelah KMO dan MSA memenuhi, maka akan didapatkan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kerentanan sosial wilayah di Kabupaten Wonogiri. Dalam proses penentuan tingkat kerentanan sosial wilayah

di Kabupaten Wonogiri, variabel dan data yang telah ditentukan perlu diukur dengan memberikan bobot atau skor dengan skala likert. Skala likert digunakan sebagai parameter pemberian bobot atau skor pada tiap variabel dan data. Nilai atau skor kerentanan sosial wilayah yang diperoleh pada 25 kecamatan digolongkan menjadi 5 kelas/ tingkatan. Kelima kelas ini disesuaikan dengan pemberian skor pada skala likert. Kelima tingkatan atau kelas tersebut meliputi Kelas I Tidak Rentan Sosial, Kelas II Kerentanan Sosial Wilayah Sangat Rendah, Kelas III Kerentanan Sosial Wilayah Rendah, Kelas IV Kerentanan Sosial Wilayah Tinggi dan Kelas V Kerentanan Sosial Wilayah Sangat Tinggi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Analisis Skoring terhadap Seluruh Variabel*

Tujuh variabel yang dianalisis yaitu, variabel modal manusia, modal sosial, kondisi geografis, jaringan politik dan pemerintahan, infrastruktur, aset-aset alam dan properti. Indikator-indikator dari 7 variabel tersebut sebelum dianalisis, dilakukan pengskoringan terlebih dahulu agar bobot tiap indikator sama serta disesuaikan dengan konsep kerentanan sosial wilayah.

Pada variabel modal manusia diperoleh tingkat kerentanan sosial pada masing-masing wilayah kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Hanya terdapat tiga golongan kelas menurut variabel modal manusia, yaitu kelas II tingkat kerentanan sosial sangat rendah, kelas III tingkat kerentanan sosial rendah dan kelas IV tingkat kerentanan sosial tinggi.



Sumber : Analisis Penyusun, 2015

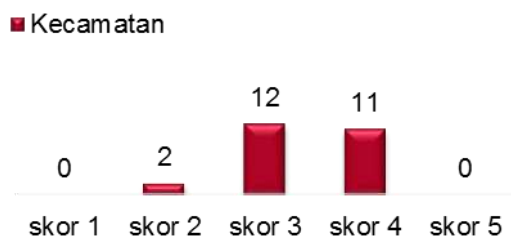
**Gambar 1**

### **Diagram Jumlah Kecamatan Berdasarkan Skor Variabel Modal Manusia**

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Wonogiri memiliki tingkat kerentanan sosial rendah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan Kabupaten Wonogiri cenderung mengalami tingkat risiko

atau kerugian rendah ketika menghadapi bencana dan ancaman, karena memiliki modal manusia (individu) yang dianggap cukup bisa bertahan dalam merespon ancaman dan bahaya yang akan datang. Dengan kata lain, sebagian kecamatan-kecamatan di Kabupaten Wonogiri memiliki karakteristik demografi (kependudukan) serta karakteristik sosial-ekonomi yang cukup baik dan siap untuk bertahan dalam merespon bahaya dan ancaman.

Pada variabel modal sosial diperoleh tingkat kerentanan sosial pada masing-masing wilayah kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Hanya terdapat tiga golongan kelas menurut variabel modal sosial, yaitu kelas II tingkat kerentanan sosial sangat rendah, kelas III tingkat kerentanan sosial rendah dan kelas IV tingkat kerentanan sosial tinggi.



Sumber : Analisis Penyusun, 2015

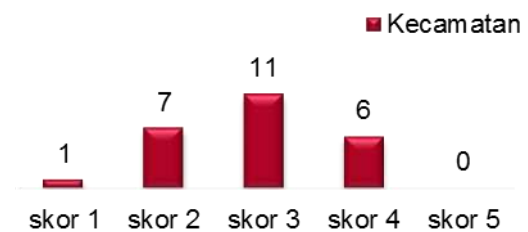
**Gambar 2**

**Diagram Jumlah Kecamatan Berdasarkan Skor Variabel Modal Sosial**

Secara keseluruhan Kabupaten Wonogiri cenderung akan mengalami dua kemungkinan. Pertama, 12 wilayah kecamatan di Kabupaten Wonogiri akan mengalami tingkat risiko atau kerugian rendah ketika menghadapi bencana dan ancaman, tetapi dapat bertahan karena memiliki modal sosial yang dianggap cukup bisa bertahan dalam merespon ancaman dan bahaya yang akan datang. Kedua, 11 wilayah kecamatan Kabupaten Wonogiri cenderung akan mengalami tingkat risiko dan kerugian yang tinggi ketika merespon bahaya dan ancaman karena memiliki modal sosial yang rendah dalam merespon bahaya, sehingga dapat dikatakan 11 wilayah kecamatan memiliki kapasitas bertahan yang rendah dalam merespon ancaman dan bahaya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat hubungan sosial di setiap kecamatan cenderung berbeda. Perbedaan tentang keaktifan dalam berorganisasi dan

berlembaga serta perbedaan dalam perolehan bantuan moral maupun materi dari LSM/NGO/INGO, membuat tingkat kerjasama penduduk setiap kecamatan memiliki kondisi yang berbeda-beda.

Pada variabel kondisi geografis diperoleh tingkat kerentanan sosial pada masing-masing wilayah kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Terdapat empat golongan kelas menurut variabel kondisi geografis, yaitu kelas I tidak rentan sosial, kelas II tingkat kerentanan sosial sangat rendah, kelas III tingkat kerentanan sosial rendah dan kelas IV tingkat kerentanan sosial tinggi.



Sumber : Analisis Penyusun, 2015

**Gambar 3**

**Diagram Jumlah Kecamatan Berdasarkan Skor Variabel Kondisi Geografis**

Sebanyak 11 kecamatan di Kabupaten Wonogiri cenderung akan mengalami tingkat risiko atau kerugian rendah ketika menghadapi bencana dan ancaman, karena memiliki kapasitas bertahan yang cukup dalam merepon bahaya yang akan datang. Hal tersebut dikarenakan kondisi geografisnya yang cukup baik. Kemudian, 7 kecamatan akan mengalami kerugian yang sangat rendah karena memiliki kapasitas bertahan yang sangat tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi geografisnya yang baik, yaitu dekat dengan pusat kot serta memiliki kelerengan yang datar dan jenis tanah yang subur. Selain itu, terdapat 6 wilayah kecamatan Kabupaten Wonogiri cenderung akan mengalami tingkat risiko dan kerugian yang tinggi ketika merespon bahaya dan ancaman, sehingga dapat dikatakan 6 wilayah kecamatan tersebut memiliki kapasitas bertahan yang rendah dalam merespon ancaman dan bahaya. Dengan demikian wilayah kecamatan yang mayoritas memiliki daerah dengan topografi datar dan berjarak cukup dekat

dengan pusat kota kabupaten serta memiliki tanah yang subur, cenderung memiliki tingkat keberlanjutan yang tinggi dibandingkan dengan wilayah kecamatan yang mayoritas bertopografi curam, tanah yang tidak subur dan jauh dari pusat kota kabupaten.

Pada variabel jaringan politik dan pemerintahan diperoleh tingkat kerentanan sosial pada masing-masing wilayah kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Terdapat empat golongan kelas menurut variabel jaringan politik dan pemerintahan, yaitu kelas I tidak rentan sosial, kelas II tingkat kerentanan sosial sangat rendah, kelas III tingkat kerentanan sosial rendah dan kelas IV tingkat kerentanan sosial tinggi.



Sumber : Analisis Penyusun, 2015

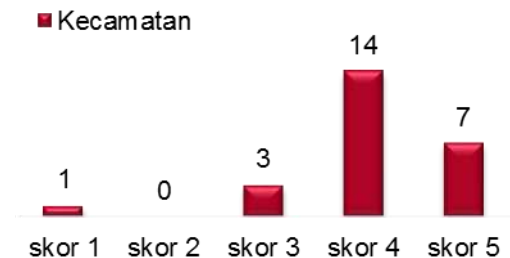
**Gambar 4**

**Diagram Jumlah Kecamatan Berdasarkan Skor Variabel Jaringan Politik dan Pemerintahan**

Sebagian besar wilayah kecamatan di Kabupaten Wonogiri cenderung mengalami tingkat kerentanan rendah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Wonogiri cenderung akan mengalami tingkat risiko dan kerugian yang rendah ketika merespon bahaya dan ancaman, karena memiliki kapasitas bertahan yang cukup dalam merespon ancaman dan bahaya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, keberadaan organisasi dan kelembagaan pemerintah serta keberadaan dan keterlibatan partai politik di sebagian besar wilayah kecamatan sangatlah berperan dalam menanggulangi risiko terhadap adanya bahaya dan ancaman. Selain itu, adanya masyarakat atau penduduk lokal yang bekerja di jaringan pemerintahan yang lebih tinggi tingkatannya juga sangat menguntungkan bagi wilayah asalnya dalam perolehan informasi-informasi yang berguna memajukan daerah asalnya dengan penyaluran yang lebih cepat.

Pada variabel infrastruktur diperoleh tingkat kerentanan sosial pada masing-masing

wilayah kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Terdapat empat golongan kelas menurut variabel infrastruktur, yaitu kelas I tidak rentan sosial, kelas III tingkat kerentanan sosial rendah, kelas IV tingkat kerentanan sosial tinggi dan kelas V tingkat kerentanan sosial sangat tinggi.



Sumber : Analisis Penyusun, 2015

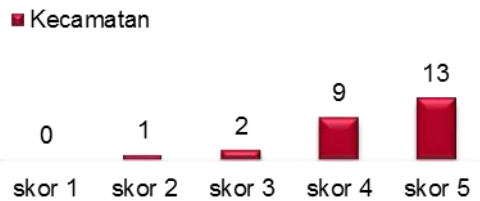
**Gambar 5**

**Diagram Jumlah Kecamatan Berdasarkan Skor Variabel Infrastruktur**

Secara keseluruhan, wilayah kecamatan Kabupaten Wonogiri cenderung akan mengalami tingkat risiko dan kerugian yang tinggi ketika merespon bahaya dan ancaman, karena memiliki kapasitas bertahan yang rendah dalam merespon ancaman dan bahaya yang akan datang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, sebagian besar kondisi infrastruktur di Kabupaten Wonogiri kurang memadai bagi penduduk tiap kecamatan. Wilayah yang memiliki ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dapat memperkecil kerentanan sosial, karena akses terhadap kebutuhan informasi, pengetahuan dan teknologi lebih mudah dibandingkan dengan wilayah yang memiliki infrastruktur yang kurang memadai.

Pada variabel aset-aset alam diperoleh tingkat kerentanan sosial pada masing-masing wilayah kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Terdapat empat golongan kelas menurut variabel kepemilikan aset-aset alam, yaitu kelas II tingkat kerentanan sosial sangat rendah, kelas III tingkat kerentanan sosial rendah, kelas IV tingkat kerentanan sosial tinggi dan kelas V tingkat kerentanan sosial sangat tinggi.





Sumber : Analisis Penyusun, 2015

**Gambar 6**

**Diagram Jumlah Kecamatan Berdasarkan Skor Variabel Aset-Aset Alam**

Sebagian besar wilayah kecamatan berada pada skor 5 (kerentanan sosial sangat tinggi). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sebagian besar Kabupaten Wonogiri cenderung akan mengalami tingkat risiko dan kerugian yang sangat tinggi ketika merespon bahaya dan ancaman, karena memiliki kapasitas bertahan yang sangat rendah dalam merespon ancaman dan bahaya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, hasil-hasil produksi alam seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pertambangan di sebagian besar wilayah Kabupaten Wonogiri dianggap belum mampu memenuhi kebutuhan penduduk wilayah kecamatan sebagai cadangan/penyimpanan untuk beradaptasi dan menanggulangi risiko dan kerugian ketika merespon bencana. Wilayah yang memiliki aksesibilitas mudah dalam menjangkau aset-aset alamnya, dianggap wilayah tersebut dapat memperkecil kerentanan sosial dibandingkan wilayah yang memiliki keterbatasan dalam mendapatkan atau menjangkau aset-aset alam tersebut.

Pada variabel properti diperoleh tingkat kerentanan sosial pada masing-masing wilayah kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Terdapat empat golongan kelas menurut variabel kepemilikan aset-aset buatan, yaitu kelas II tingkat kerentanan sosial sangat rendah, kelas III tingkat kerentanan sosial rendah, kelas IV tingkat kerentanan sosial tinggi dan kelas V tingkat kerentanan sosial sangat tinggi.



Sumber : Analisis Penyusun, 2015

**Gambar 7**

**Diagram Jumlah Kecamatan Berdasarkan Skor Variabel Properti**

Secara keseluruhan wilayah kecamatan di Kabupaten Wonogiri memiliki dua kemungkinan. Pertama, 12 wilayah kecamatan di Kabupaten Wonogiri akan mengalami tingkat risiko atau kerugian rendah ketika menghadapi bencana dan ancaman, karena memiliki kapasitas bertahan yang cukup dalam merespon bahaya yang akan datang. Kedua, 10 wilayah kecamatan Kabupaten Wonogiri cenderung akan mengalami tingkat risiko dan kerugian yang tinggi ketika merespon bahaya dan ancaman, karena memiliki kapasitas bertahan yang rendah dalam merespon ancaman dan bahaya yang akan datang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, banyaknya lahan terbangun atau permukiman dan bangunan komersial seperti industri dan pasar dapat memperkecil kerentanan sosial wilayah. Hal tersebut dikarenakan, semakin banyaknya properti yang dimiliki oleh suatu wilayah maka dapat dikatakan bahwa kesejahteraan penduduknya lebih baik. Properti sangat erat hubungannya dengan kemiskinan dan kesejahteraan penduduk. Properti merupakan barang privat atau pribadi yang menjadi salah satu keberhasilan dari pembangunan. Oleh karena itu, wilayah yang memiliki kepadatan atau jumlah lahan dan bangunan pribadi maupun komersial dengan tingkat yang lebih besar, maka wilayah tersebut dianggap memiliki kerentanan sosial lebih rendah dibandingkan wilayah yang memiliki sedikit lahan dan bangunan terbangun.

### Analisis Faktor

Pada proses analisis faktor tahap pertama nilai KMO sebesar 0.629 dan pada tahap kedua sebesar 0.683 yang artinya data dapat diolah dan dapat diterima. Sedangkan



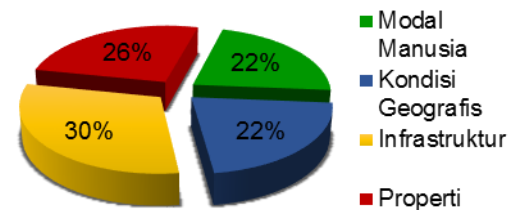
nilai MSA diperuntukkan hanya pada data yang memiliki nilai MSA  $>0,5$  yang dapat dilakukan analisis pada tahap selanjutnya, sehingga bagi data yang memiliki nilai MSA  $<0,5$  berarti analisis faktor tidak dapat dilakukan dan variabel tersebut harus dikeluarkan. Terdapat 2 variabel yang memiliki nilai MSA  $<0,5$  yaitu V2 (modal sosial) dan V6 (aset-aset alam). Oleh karena itu, perlunya dihilangkan atau direduksi sebagian variabel agar nilai KMO dan MSA dapat terpenuhi. Variabel V2 dan V6 dipilih untuk dihilangkan dari analisis karena memiliki nilai MSA terendah yaitu 0.486 dan 0.380 pada uji tahap I, sedangkan variabel V4 dipilih untuk dihilangkan juga karena memiliki nilai MSA 0.336 pada uji tahap II.

Setelah variabel modal sosial (V2), aset-aset alam (V6) dan jaringan politik serta pemerintahan (V4) dikeluarkan dari analisis, maka diperoleh nilai KMO sebesar 0,728. Nilai KMO yang diperoleh lebih besar dari 0,5, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang digunakan dapat diolah dengan analisis faktor. Karena nilainya 0,728 maka artinya data yang digunakan dapat diterima dan cukup memuaskan. Sedangkan nilai MSA yang diperoleh pada proses analisis ketiga ini menunjukkan dari empat variabel yang dianalisis, seluruhnya memiliki nilai MSA lebih dari 0,5, sehingga syarat kedua dalam analisis faktor telah terpenuhi dan dapat dilanjutkan pada tahapan selanjutnya.

Berdasarkan analisis faktor yang telah dilakukan sebanyak 3 kali serta sudah terpenuhinya syarat-syarat kunci dalam menentukan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kerentanan sosial wilayah di Kabupaten Wonogiri, maka diperoleh 4 faktor dominan dalam menentukan tingkat kerentanan sosial wilayah pada 25 kecamatan. Faktor-faktor dominan tersebut terdiri dari faktor modal manusia, faktor kondisi geografis, infrastruktur dan properti. Keempat faktor dominan tersebut merupakan faktor yang nantinya akan digunakan dalam perhitungan besar kecilnya tingkat kerentanan sosial wilayah pada 25 kecamatan di Kabupaten Wonogiri.

### **Analisis Tingkat Kontribusi Faktor Dominan**

Tingkat kontribusi faktor dominan yang paling besar yaitu faktor infrastruktur sebanyak dan tingkat kontribusinya paling kecil yaitu faktor kondisi geografis dan modal manusia.



Sumber : Analisis Penyusun, 2015

**Gambar 8**  
**Diagram Persentase Tingkat Kontribusi Faktor-Faktor Dominan**

Tingkat kontribusi faktor dominan yang paling besar yaitu faktor infrastruktur sebanyak 30%, disusul oleh faktor properti yaitu sebesar 26%. Faktor modal manusia dan faktor kondisi geografis memiliki tingkat persentase yang sama yaitu sebesar 22%. Dengan demikian, artinya faktor infrastruktur berpengaruh besar terhadap penentuan tinggi rendahnya kerentanan sosial wilayah pada 25 kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Ketersediaan infrastruktur yang lengkap dan baik dapat memudahkan segala akses penduduk dalam suatu wilayah untuk melakukan kegiatannya. Infrastruktur merupakan hasil dari pembangunan wilayah, tetapi dampak kepada kesejahteraan masyarakat itulah yang merupakan kunci keberhasilan dari pembangunan wilayah.

### **Analisis Tingkat Kerentanan Sosial Wilayah**

Analisis tingkat kerentanan sosial wilayah dilakukan dengan penggolongan atau pengkelasan tingkat kerentanan sosial wilayah. Penggolongan kelas dibagi menjadi lima tingkatan kelas kerentanan sosial wilayah. Penentuan kelas dan golongan ditentukan berdasarkan karakteristik kelima faktor dominan kerentanan sosial wilayah di setiap kecamatan. Masing-masing kecamatan akan memiliki nilai skor akhir yang digunakan untuk menentukan interval atau range di setiap kelas. Kecamatan yang memiliki nilai

skor terbesar yaitu Kecamatan Kismantoro dengan nilai 19.50, sedangkan kecamatan yang memperoleh nilai skor terkecil yaitu Kecamatan Wonogiri dengan nilai 12.67. Interval tiap kelas diperoleh dari pengurangan antara nilai skor tertinggi dengan nilai skor terendah, kemudian dibagi lima karena kelas atau golongan yang ditentukan berjumlah lima kelas. Range atau interval yang diperoleh yaitu bernilai 1.37 pada setiap kelasnya.

**Tabel II**  
**Tingkat Kerentanan Sosial Wilayah**  
**Kabupaten Wonogiri**

Kelas	Golongan	Range Nilai Skor	Kecamatan
I	Tidak Rentan Sosial Wilayah	12.67-14.03	Wonogiri dan Wuryantoro
II	Kerentanan Sosial Wilayah Sangat Rendah	14.04-15.40	Puhpelem, Jatisrono dan Pracimantoro
III	Kerentanan Sosial Wilayah Rendah	15.41-16.77	Selogiri, Ngadirojo, Girimarto, Slogohimo, Sidoharjo, Tirtomoyo, Baturetno, Giriwoyo dan Paranggupito.
IV	Kerentanan Sosial Wilayah Tinggi	16.78-18.14	Nguntoronadi, Batuwarno, Giritontro, Karangtengah, Jatiroto, Manyaran, Purwantoro, Bulukerto dan Jatipurno
V	Kerentanan Sosial Sangat Tinggi	18.15-19.50	Eromoko dan Kismantoro

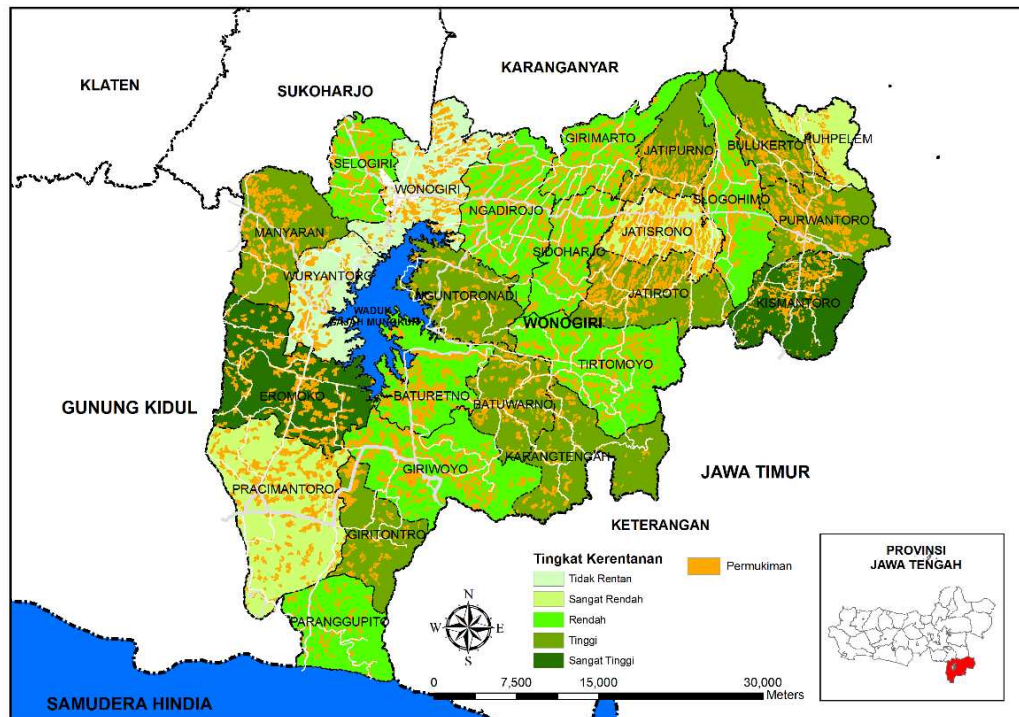
Sumber : Analisis Penyusun, 2015

Golongan tidak rentan sosial wilayah atau kelas I dengan dua anggota wilayah kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Wonogiri dan Kecamatan Wuryantoro merupakan wilayah di Kabupaten Wonogiri yang tidak memiliki kerentanan sosial wilayah. Artinya, kedua wilayah kecamatan tersebut dianggap tidak memiliki ancaman dan bahaya dari segi sosialnya. Golongan kerentanan sosial wilayah sangat rendah atau kelas II

dengan tiga anggota wilayah kecamatan, terdiri dari Kecamatan Puhpelem, Jatisrono dan Pracimantoro adalah wilayah di Kabupaten Wonogiri dimana wilayah tersebut jika mengalami suatu bencana atau bertemu dengan bahaya akan menghasilkan tingkat risiko kerusakan atau kerugian bernilai sangat rendah/kecil, sehingga wilayah tersebut dikatakan memiliki kapasitas ketahanan atau penanggulangan yang sangat tinggi dalam merespon bahaya.

Golongan kerentanan sosial wilayah rendah atau kelas III dengan sembilan anggota wilayah kecamatan, terdiri dari Kecamatan Selogiri, Ngadirojo, Girimarto, Slogohimo, Sidoharjo, Tirtomoyo, Baturetno, Giriwoyo dan Paranggupito adalah wilayah di Kabupaten Wonogiri dimana wilayah tersebut jika mengalami suatu bencana atau bertemu dengan bahaya akan menghasilkan tingkat risiko kerusakan atau kerugian bernilai rendah/kecil, sehingga wilayah tersebut dikatakan memiliki kapasitas ketahanan atau penanggulangan yang rendah dalam merespon bahaya. Oleh karena itu, wilayah dalam kelas III dapat dikatakan merupakan tingkatan yang paling seimbang/sedang/cukup terhadap tingkat risiko dan kapasitas bertahan.

Golongan kerentanan sosial wilayah tinggi atau kelas IV dengan sembilan anggota wilayah kecamatan, terdiri dari Kecamatan Nguntoronadi, Batuwarno, Giritontro, Karangtengah, Jatiroto, Manyaran, Purwantoro, Bulukerto dan Jatipurno adalah wilayah di Kabupaten Wonogiri dimana wilayah tersebut jika mengalami suatu bencana atau bertemu dengan bahaya akan menghasilkan tingkat risiko kerusakan atau kerugian bernilai tinggi/besar, sehingga wilayah tersebut dikatakan memiliki kapasitas ketahanan atau penanggulangan yang rendah dalam merespon bahaya.



Sumber : Analisis Penyusun, 2015

**Gambar 9**  
**Peta Tingkat Kerentanan Sosial Wilayah Kabupaten Wonogiri**

Golongan terakhir yaitu golongan kerentanan sosial wilayah sangat tinggi atau kelas V dengan dua anggota wilayah kecamatan, terdiri dari Kecamatan Kismantoro dan Eromoko adalah wilayah di Kabupaten Wonogiri dimana wilayah tersebut jika mengalami suatu bencana atau bertemu dengan bahaya akan menghasilkan tingkat risiko kerusakan atau kerugian bernilai sangat tinggi/besar, sehingga wilayah tersebut dikatakan memiliki kapasitas ketahanan atau penanggulangan yang sangat rendah dalam merespon bahaya.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kerentanan sosial wilayah dilatarbelakangi oleh adanya fenomena yang bersifat merugikan bagi suatu wilayah, seperti kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan dalam perencanaan wilayah di Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Wonogiri. Adanya isu kemiskinan pada wilayah Kabupaten Wonogiri mengakibatkan wilayah tersebut berpotensi rentan atau rapuh terhadap ancaman dan bahaya yang akan datang, sehingga penelitian ini berfungsi untuk mengetahui tingkat kerentanan sosial

wilayah di Kabupaten Wonogiri. Beberapa tokoh/peneliti tentang kerentanan sosial wilayah mengatakan bahwa kerentanan sosial wilayah merupakan representasi kondisi atau keadaan suatu wilayah sebelum terjadinya bencana maupun bahaya, sehingga kerentanan sosial wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial. Faktor sosial yang dimaksudkan yaitu, modal manusia, modal sosial, jaringan politik serta akses terhadap kepemilikan aset-aset dan fasilitas umum. Oleh karena itu, untuk mengetahui tingkat kerentanan sosial wilayah di Kabupaten Wonogiri dilakukan melalui pendekatan penelitian dengan metode survei.

Tingkat kerentanan sosial wilayah Kabupaten Wonogiri secara dominan termasuk dalam Kelas II dan IV dengan kategori tingkat kerentanan rendah dan tinggi. Kerentanan sosial wilayah di Kabupaten Wonogiri dipengaruhi oleh empat faktor antara lain, faktor modal manusia, faktor kondisi geografis, faktor infrastruktur serta faktor properti. Faktor yang memiliki kontribusi terbesar dalam penentuan tingkat kerentanan sosial wilayah di Kabupaten Wonogiri adalah faktor infrastruktur. Wilayah dengan kualitas infrastruktur yang lebih tinggi

menghasilkan kualitas yang lebih baik dalam menanggapi resiko bencana, ancaman maupun bahaya yang terjadi.

Kerentanan sosial wilayah sangat berkaitan dengan tiga hal, yaitu kemiskinan, infrastruktur dan kondisi alam yang rentan. Kemiskinan adalah citra dari tingkat keberhasilan pembangunan wilayah. Kemiskinan wilayah timbul akibat kurang berhasilnya pembangunan wilayah dalam mensejahterakan penduduknya. Adanya pelayanan publik atau infrastruktur merupakan bukti adanya pembangunan wilayah. Akan tetapi, keberhasilan pembangunan wilayah tidak selalu berjalan dengan seperti yang diharapkan. Walaupun kualitas infrastruktur wilayah lebih baik, belum tentu menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik juga. Hal tersebut menjadikan wilayah-wilayah yang dianggap miskin berpotensi memiliki kerentanan sosial wilayah. Selain itu, wilayah dengan kondisi alam yang rentan cenderung memperbesar potensi adanya kerentanan sosial.. Akses terhadap sumber daya alam di Kabupaten Wonogiri tidak cukup mudah. Hal tersebut dikarenakan karakteristik fisik wilayah mayoritas kecamatan di Kabupaten Wonogiri memiliki kondisi kelerengan yang curam, sehingga rawan terjadi bencana yang dapat merusak sumber daya alam yang dimiliki. Sulitnya akses terhadap sumber daya alam yang berlimpah dibuktikan dengan masih banyaknya wilayah kecamatan yang memiliki hasil alam yang sangat sedikit dibandingkan wilayah kecamatan lain. Selain itu, sebagian besar penduduk di Kabupaten Wonogiri bekerja di sektor primer yang artinya sangat bergantung sekali dengan sumber daya alam padahal mayoritas jenis tanah di Kabupaten Wonogiri bersifat tidak subur untuk kegiatan pertanian. Oleh karena itu, tidak heran bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Wonogiri melakukan migrasi keluar wilayah untuk mencari pekerjaan yang lebih layak dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dengan demikian, berdasarkan karakteristik wilayah Kabupaten Wonogiri dari segi penduduk dan fisiknya serta berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dijabarkan, maka keadaan wilayah Kabupaten Wonogiri

dikatakan rapuh atau rentan sosial dengan ketahanan atau kapasitas bertahan rendah dalam menanggulangi dan menghadapi bencana/ancaman yang akan datang. Oleh karena itu, akibat dari kerentanan sosial wilayah yang tinggi menyebabkan wilayah Kabupaten Wonogiri cenderung mengalami kesulitan dalam pemulihan pasca bencana.

### **Rekomendasi**

Dari kesimpulan di atas, dapat direkomendasikan beberapa hal untuk pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam perumusan atau penyusunan kebijakan bagi setiap wilayah kecamatan yang ada. Beberapa rekomendasi yang dapat peneliti berikan antara lain :

1. Penyebaran titik-titik lokasi fasilitas umum seperti sarana kesehatan dan pendidikan pada pusat-pusat kegiatan lingkungan (PKL) di Kabupaten Wonogiri agar lebih menjangkau wilayah-wilayah kecamatan yang jauh dari pusat kota kabupaten.
2. Penyebaran yang lebih merata terkait prasarana air bersih dan listrik terhadap kecamatan-kecamatan yang belum teraliri atau terfasilitasi.
3. Penyebaran titik-titik sumber air alternatif bagi wilayah kecamatan yang memiliki jenis tanah tandus dan curah hujan rendah, yang mayoritas terletak pada wilayah Kabupaten Wonogiri bagian selatan. Karena sebagian besar wilayah Kabupaten Wonogiri biasanya mengalami kekeringan pada musim kemarau.
4. Penyebaran titik-titik fasilitas penunjang kegiatan perkonomian Kabupaten Wonogiri, seperti jaringan jalan dan sarana transportasi untuk mendukung kegiatan pertanian maupun perdagangan penduduk Kabupaten Wonogiri serta sarana penunjang aktivitas perdagangan pada pasar maupun terminal yang sudah ada.
5. Perlu adanya penyuluhan/program dan kegiatan terkait kesiapsiagaan atau waspada terhadap bencana/ancaman/bahaya untuk masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah perbukitan terjal atau rawan bencana serta wilayah yang

memiliki jarak cukup jauh dari pusat kota, seperti Kecamatan Giritontro, Karangtengah dan Kismantoro. Kesiapsiagaan atau sikap waspada akan bencana ini lebih prioritas diberikan kepada penduduk wanita, anak-anak dan penduduk lanjut usia. Dengan demikian, dapat memperkecil kerugian dan risiko yang akan dialami.

6. Menciptakan dan mendorong kegiatan yang terkait kepariwisataan terhadap kecamatan-kecamatan yang memiliki potensi wisata yang mungkin belum diketahui banyak orang, seperti perencanaan desa wisata di Desa Semin Kecamatan Nguntoronadi dengan menonjolkan komoditas buah naga dan wisata kuliner hasil budidaya perikanan di Kecamatan Wuryantoro.
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana penunjang kegiatan kepariwisataan yang sudah ada dan terkenal, seperti pariwisata pantai di Kecamatan Paranggupito, museum karst di Kecamatan Pracimantoro, pariwisata ritual keagamaan atau air terjun kahyangan di Kecamatan Tirtomoyo dan pariwisata Waduk Gajah Mungkur di Kecamatan Wonogiri.
8. Perlu adanya peningkatan mutu atau kualitas sumber daya manusia, khususnya terhadap sumber daya manusia di Kecamatan Girimarto, Jatisrono, Purwantoro, Kismantoro dan Pracimantoro. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bisa dilakukan dengan menekan jumlah angka kematian bayi dan balita, memberikan bantuan khusus berupa perhatian/perlakuan yang lebih intensif terhadap penduduk difabel, menekan angka pengangguran dengan memberikan pelatihan ketrampilan kerja, serta memberikan penyuluhan akan pentingnya pendidikan tinggi

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwang, J. et al., 2001. *Social Protection Discussion Paper Series Vulnerability*: A View From Different Disciplines, Washington D.C.
- Bosher, L., 2007. *Social and Institutional Elements of Disaster Vulnerability*. Loughborough University.
- Cutter, S.L. et al., 2003. Social Vulnerability to Environmental Hazards n. *Social Science Quarterly*, 84(2), pp.242–261.
- Dunning, C.M. & Durden, S., 2013. *Social Vulnerability Analysis*: A Comparison of Tools, Alexandria.
- Hizbaron, D.R. et al., 2010. Tinjauan Kerentanan, Risiko dan Zonasi Rawan Bahaya Rockfall di Kulonprogo, Yogyakarta. *Forum Geografi*, 24, pp.119–136.
- Lee, Y.-J., 2014. Social vulnerability indicators as a sustainable planning tool. *Environmental Impact Assessment Review*, 44, pp.31–42. Available at: <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0195925513000802> [Accessed January 19, 2015].
- Wahyudi, D. & Rejekingsih, T.W., 2013. Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Economics*, 2, pp.1–15.